

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERAN WALHI YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN PROPORSI RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA YOGYAKARTA

Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan bagaimana lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan dalam perancangan politik di Indonesia. Peran dan aktivitas kalangan LSM itu ternyata telah menjadi fenomena politik yang menarik di era 1970-an. Sampai sekarang ketika demokrasi dan masyarakat madani menjadi wacana yang berkembang pesat sejak awal 1990-an peran LSM bisa diharapkan lebih proaktif untuk mengisi ruang publik yang tersedia antara rakyat dan negara.

Dalam bab ini akan dibahas sejauh mana aktivitas Walhi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai organisasi masyarakat yang bersifat mandiri, yaitu LSM yang bergerak di bidang advokasi lingkungan hidup dalam berperan sebagai aktor politik yang diharapkan mampu mempengaruhi dan sekaligus merubah kebijakan publik terutama masalah yang menyangkut Lingkungan hidup. Tetapi terlebih dahulu penulis akan memaparkan secara teoritis kemungkinan – kemungkinan peran strategis LSM secara umum dalam tatanan kehidupan politik yang demokratis. Untuk kemudian barulah bisa dianalisis data – data yang telah ada mengenai fenomena peran Walhi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dalam hal ini diambil studi kasus tentang peran walhi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta.

Sejak tahun 1990-an semakin banyak LSM yang bergerak melawan pemerintah, hubungan antar pemerintah dan LSM semakin memburuk¹. Tuduhan utama adalah LSM telah berlawanan dengan ideologi negara maupun dengan kepentingan nasional. Akan tetapi, faktor sebenarnya dari memburuknya hubungan tersebut adalah karena tumbuhnya generasi LSM yang berorientasi radikal yang menentang berbagai kebijakan pemerintah. LSM telah dituduh “Berpolitik” dan mengorganisasikan rakyat miskin. Dipihak lain, jenis LSM yang bersifat “politik” ini oleh Ganie-Rochman² disebut sebagai LSM Advokasi. LSM Advokasi didefinisikan sebagai mereka yang kegiatannya bertujuan untuk adanya perubahan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Menurut dia ciri-ciri LSM advokasi adalah :

1. Target pada badan-badan pemerintah.
2. Target pada badan-badan internasional.
3. Adanya strategi advokasi.
4. Adanya metode advokasi.
5. Adanya tujuan-tujuan transformasi.

Isu-isu advokasi juga dilakukan lewat pembentukan opini publik di media massa. Bagi LSM, advokasi bukan hanya alat untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, tetapi juga untuk memperluas ruang politik mereka. Ada tiga hal Strategi LSM advokasi Indonesia pada umumnya yaitu³ :

1. Memilih pengadilan sebagai arena politik.
2. Menargetkan pada perubahan peraturan, kebijakan dan UU.

¹ Hadiwinata S Bob, “*The Politics of NGOS Ni Indonesia: Developing Democracy Ana Managing a movement*”, Routledge Curzon, New York, Disunting oleh Bonnie Setyawan, Global Justice

²*Ibid*, hal 5

³*Ibid*, hal 284

3. Menggali dukungan advokasi internasional.

Strategi ini ditempuh agar mendapatkan cara yang lebih aman dan efektif. Bagi LSM, advokasi politik seperti melalui DPR dipandang terlalu riskan dan tidak berguna karena DPR secara instruksi dan koordinasi DPR merupakan bagian dari pemerintahan. Karena itu, advokasi lebih banyak dilakukan lewat bantuan media massa dan lewat pertemuan-pertemuan publik. Advokasi juga dilakukan melalui jaringan-jaringan yang ada maupun lewat pembentukan koalisi-koalisi.

Peran walhi Yogyakarta selaku LSM lingkungan dalam mengawasi pengelolaan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta yang mengacu pada fungsi dan peranan LSM Lingkungan dalam bidang non politik melalui pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, sekaligus peranan dalam bidang politik. Fungsi penghubung, yaitu sebagai wahana untuk menjembatani antara masyarakat dengan negara dan pemerintah⁴ dan fungsi subside, yang mengacu pada fungsi-fungsi dari LSM Lingkungan.

1. Fungsi Pemberdayaan

Seperti yang sudah dibahas di atas bahwasanya Walhi merupakan salah satu LSM Advokasi yang menempatkan Lingkungan sebagai salah satu isu utama dalam kegiatan Advokasinya. ebagai suatu organisasi yang berfungsi sebagai wadah para pemuda pencinta lingkungan adalah peranannya disini sebagai suatu konsep fungsional yang mencoba untuk menjelaskan fungsi organisasi ini yang notabene terdiri dari individu-individu

⁴*ibid*

yang memiliki fungsi struktural dalam organisasi. Peranan LSM sebagai fasilitator, dengan memberikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan pemberdayaan, guna membangkitkan kembali rasa kepercayaan diri masyarakat lokal, agar dapat aktif dalam kehidupan sosial, serta terciptanya kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya⁵. Pemberdayaan yang sifatnya membangun karakter, agar hidup terus maju kedepan dan dapat menggapai segala cita-cita yang diharapkan. Pemberdayaan artinya adalah penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan bermasyarakat⁶. Shardlow, melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi

⁵Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 58-59

⁶Yusra Kilun (editor), *Pengembangan Komunitas Muslim: Pemberdayaan Masyarakat Kampung Badak Putih Dan Kampung Satu Duit* (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h. 57

permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya⁷.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses⁸.

Pemberdayaan bertujuan meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan (*the disadvantaged*)⁹. Pemberdayaan diberikan kepada masyarakat lemah atau masyarakat miskin. Pemberdayaan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat hidup lebih baik lagi. Menciptakan kesejahteraan sosial pada tatanan kehidupan masyarakat. Masyarakat miskin perlu diberdayakan agar mereka dapat aktif dalam kegiatan sosial dan dapat memenuhi kehidupannya sendiri. Dari berbagai konsep tentang pemberdayaan, jelas pemberdayaan (*empowerment*) bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran,

⁷Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, h. 164.

⁸Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, h. 59-60.

⁹Jim Iff dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*, diterjemahkan oleh Sastrawan Manullang dkk (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 130

kebodohan dan keterbelakangan pada masyarakat agar mereka berdaya dan memiliki semangat dalam menjalankan hidup dalam kegiatan sosial di masyarakat.

1. Strategi Pemberdayaan

Dalam melakukan fungsi pemberdayaan (*empowerment*) terdapat beberapa strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Walhi Yogyakarta, agar pemberdayaan yang dilakukan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Oleh karena itu dibutuhkan strategi-strategi dalam pemberdayaan ini. Dalam konteks pekerja sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro.

- a. Aras Mikro adalah pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*, dengan tujuan utamanya, yaitu membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Strategi ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- b. Aras Mezzo adalah pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok klien, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Adapun pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- c. Aras Makro adalah pendekatan yang disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahannya diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Strategi ini digunakan untuk melakukan

40 perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. strategi sistem besar ini, memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menemukan strategi yang tepat untuk bertindak.¹⁰

2. Kegiatan – Kegiatan Pemberdayaan WALHI Yogyakarta terkait Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta.

Peranan Walhi Yogyakarta dalam melakukan kegiatan – kegiatan pemberdayaan masyarakat menggunakan strategi pemberdayaan Aras Makro. Seperti yang sudah dipaparkan diatas, Aras Makro adalah pendekatan yang disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahannya diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Strategi ini digunakan untuk melakukan 40 perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. strategi sistem besar ini, memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menemukan strategi yang tepat untuk bertindak.¹¹

¹⁰Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 66-67.

¹¹*Ibid*

Adapun kegiatan pemberdayaan Walhi Yogyakarta dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

a) Melindungi dan membela kepentingan masyarakat.

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik antara lain adalah, taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungan dan pantai. Sedangkan yang termasuk ruang terbuka hijau privat adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik swasta/masyarakat yang ditanami tumbuhan. Dalam hal ini, proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikrolimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Pendampingan Walhi Yogyakarta terhadap warga Gambiran untuk mendorong pemerintah mendirikan RTH, melihat dari kurangnya RTH publik di kawasan tersebut. Dalam hal ini Walhi Yogyakarta bergerak untuk kepentingan warga Gambiran menuntut pemerintah untuk mendirikan RTH di Kawasan tersebut.

Sebagai mana yang dijelaskan oleh Halik Sandera selaku Dewan daerah Walhi DIY periode 2013 – 2017 :

“sebelum kita memutuskan untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang meminta untuk dibantu dalam proses penuntutan, sebelumnya Walhi Yogyakarta juga akan melakukan kajian-kajian rasional dari tuntutan yang akan dilakukan tersebut apakah sesuai dengan visi dan misi Walhi Yogyakarta. Dari hasil kajian tersebut barulah selanjutnya kita akan selalu mendampingi dan memfasilitasi kegiatan tuntutan tersebut sesuai dengan apa yang diaharapkan masyarakat.”¹²

Dalam hal ini walhi selaku pendamping warga gambiran melalui divisi investigasi dan respons issue, Walhi berusaha menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat gambiran yang menuntut kepada pemerintah agar dibangunnya RTH di kawasan tersebut. Baru kemudian issue yang masuk dibahas melalui divisi data dan info untuk kemudian akan dipublikasikan melalui divisi kampanye.

¹²*Ibid*

b) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat

Peran Walhi selaku lembaga swadaya masyarakat kemudian menjadi sangatlah penting untuk mengendalikan aktivitas dan menjembatani kepentingan dan kebutuhan berbagai pihak, terutama masyarakat sebagai pemegang kendali kedaulatan. Karena pada prakteknya, kebijakan yang dikeluarkan memang tidak mampu memuaskan semua pihak, dan tak jarang masyarakat menjadi pihak yang dirugikan, yang kemudian memancing reaksi masyarakat untuk berggerak secara mandiri. Sesuai visi dan misi yang diemban Walhi Yogyakarta, penguatan organisasi rakyat melalui kegiatan pelatihan yang menjadi salah satu upaya yang ditempuh untuk mendukung berbagai gerakan masyarakat tersebut.

Kegiatan Walhi Yogyakarta untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat adalah melalui kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendidikan, adapun kegiatan Walhi Tersebut adalah :

- 1) Pelatihan Paralegal dan AMDAL Kijang
- 2) Pemantauan Lingkungan dan Pendidikan Kader Rakyat

1) Pelatihan Paralegal dan AMDAL Kijang

Dalam berbagai kasus sengketa lingkungan yang muncul antara masyarakat dengan pengusaha, seringkali seperti upaya yang sia – sia. Masyarakat yang mencoba untuk memperjuangkan haknya akan lingkungan hidup yang baik, kemudian dipaksa menyerah karena keterbatasan pengetahuan akan upaya alternatif lain yang mungkin untuk dilakukan. Menyadari Indonesia adalah negara hukum, jalur hukum kemudian menjadi pilihan. Namun pengetahuan masyarakat akan langkah-langkah hukum yang minim juga menjadi kendala. Hal tersebut kemudian menjadi penting untuk Walhi Yogyakarta untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan mengenai analisa kerusakan dan pencemaran lingkungan beserta dokumennya. Gerakan yang berdampak dan berpengaruh adalah gerakan yang masif, maka penting juga gerakan advokasi masyarakat dikuatkan dengan membekali sistematika menyusun strategi advokasi, termasuk didalamnya adalah bagaimana memetakan orang-orang. Juga pengenalan terhadap sistem hukum di Indonesia, termasuk tentang paralegal agar masyarakat mampu untuk melakukan pembelaan melalui organisasi rakyat.

2) Pemantauan Lingkungan dan Pendidikan Kader Rakyat

Analisa sosial diperlukan agar masyarakat mampu mengambil sikap dan langkah yang efektif terhadap berbagai kondisi. Banyaknya aktivitas yang mengancam kelestarian lingkungan, disadari masyarakat telah mengancam sumber-sumber kehidupan dan penghidupan mereka. Kondisi yang timbul kemudian memaksa masyarakat untuk dapat melakukan pemantauan lingkungan. Pelatihan Pemantauan Lingkungan dan Pendidikan Kader Rakyat secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan komunitas dampingan Walhi Yogyakarta di 5 kawasan dalam melakukan pemantauan lingkungan dan analisis secara sederhana di wilayah masing-masing.

Selain dari kegiatan-kegiatan tersebut, bentuk lain dari usaha Walhi Yogyakarta untuk meningkatkan potensi atau daya yang dimiliki masyarakat adalah dengan membentuk Warga Berdaya, sebuah forum diskusi untuk bersama-sama mendiskusikan keadaan Yogyakarta kini, juga masalah-masalah yang tengah berkembang, dan secara bersama-sama memikirkan solusi. Proses diskusi ini selain berguna untuk membuat masyarakat peduli, juga membuat masyarakat itu sendiri secara mandiri memiliki solusi, dan ketika solusi itu membutuhkan bantuan maka saat itu Walhi Yogyakarta akan membantu. Walhi Yogyakarta terus mendampingi masyarakat untuk membuat tindakan pencegahan, kegiatan ini merupakan advokasi Walhi Yogyakarta dengan didasarkan kepada empat isu strategis tersebut

c) Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan disekitarnya

Sebagai salah satu upaya Walhi Yogyakarta dalam melaksanakan fungsinya sebagai LSM lingkungan, yaitu menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan sekitarnya, yaitu Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berbentuk pengakomodiran masyarakat untuk ikut terlibat dan peduli terhadap permasalahan lingkungan sekitar adalah pembentukan Sahabat Lingkungan (SHALINK).

Sha-link merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh Walhi Yogyakarta, sebagai salah satu media Walhi Yogyakarta dalam mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. sebelumnya, *Organ Support* Sahabat Lingkungan dibentuk untuk mewadahi semua elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan menjaga kelangsungan kelestarian lingkungan. Sebagai *Organ Support*, kiprah Sha-Link sangat luar biasa mendukung kegiatan advokasi lingkungan Walhi Yogyakarta. Pada kegiatannya Sha-Link berfokus pada pendidikan alternatif, dengan bentuk kegiatan kampanye lingkungan dan pendidikan lingkungan.

Kegiatan kegiatan sahabat lingkungan Walhi Yogyakarta

1. Kampanye lingkungan

- a) Diskusi
- b) Seminar
- c) Sarasehan
- d) Pameran

2. Pendidikan Lingkungan

- a) Diskusi rutin anggota Sahabat Lingkungan
- b) *Basic Environmental Training (BET)*, yang dalam perkembangannya menjadi agendan rutin tahunan Komunitas Sahabat Lingkungan
- c) Menjadi pemateri – pemateri lingkungan disetiap kegiatan yang mengundang partisipatif Sahabat Lingkungan

Sha-Link adalah salah satu bentuk jaringan yang memiliki fungsi dan peran sebagai organ support yang tujuannya adalah sebagai penggalang dana, dukungan juga edukasi. Sha-Link adalah salah satu jaringan terluar diluar struktur organisasi WALHI Yogyakarta yang terdiri dari individu yang menjadi relawan, karena tanpa batasan dan label organisasi maka Sha-Link memiliki potensi menarik dukungan dari masyarakat umum.

Sekan organ support Sha-Link, Walhi Yogyakarta juga membentuk Warga Berdaya. Warga Berdaya adalah sebuah forum diskusi yang terdiri dari masyarakat-masyarakat diseluruh Yogyakarta, dimana kegiatan utamanya adalah untuk melakukan diskusi dan pengenalan kasus dan isu yang tengah terjadi, ataupun potensi permasalahan yang akan terjadi berdasarkan fakta dilapangan yang diketahui oleh masyarakat. Dengan bentuknya yang berupa forum diskusi maka Warga Berdaya ini memberikan efek jaringan berupa penyebaran isu dan juga edukasi yang dilakukan secara tidak langsung dan dilakukan mandiri oleh masyarakat sendiri, dengan fungsinya sebagai penyebar isu secara otomatis maka dukungan dan pengakuan dari pihak luar seperti masyarakat lain ataupun media akan semakin meningkat

2. Fungsi Penghubung

WALHI mengemban misi sebagai wahana perjuangan penegakan kedaulatan rakyat dan demokrasi untuk pemenuhan keadilan, pemerataan sosial, pengawasan rakyat atas kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat, serta penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan demokratis. Sekaligus menjadi penghubung atau perantara yakni lembaga birokrasi dan pemerintah belum dapat menjangkau lapisan bawah atau sebaliknya masyarakat tingkat bawah tidak dapat menjangkau atau memperoleh fasilitas yang disediakan pemerintah, maka LSM dapat berperan untuk menghubungkan atau menjadi perantara yang aktif antara masyarakat di tingkat bawah dengan pemerintah ditingkat atas, serta ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, Walhi Yogyakarta mengupayakan antara lain :

1. Membangun Lembaga Mitra Pemerintah
2. Melakukan Advokasi
3. Melakukan Investigasi Terhadap Kasus-kasus Pencemaran lingkungan
4. Melakukan Kampanye Secara Luas dan Menyeluruh
5. Membangun Critical Mass Sebagai Wujud Dari Pentingnya Lingkungan Hidup;

a) Membangun Lembaga Mitra Pemerintah

WALHI adalah anggota dari Friends Of The Earth International (FOEI), Pada tanggal 19 September 1986 diadakan pertemuan dialogis mengenai lingkungan hidup dengan output salah satunya adalah kebutuhan bersama yang dapat menampung aspirasi, mempermudah koordinasi, berbagi informasi guna pelestarian lingkungan

hidup, berdasarkan kesepakatan diatas itu pula Walhi Daerah Istimewa Yogyakarta diresmikan atas surat izin dan persetujuan Walhi Nasional maka secara resmi Walhi DIY menjadi forum daerah untuk Daerah Istimewa Yogyakarta terbentuk.¹³

Walhi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu forum daerah Walhi yang ada di Indoensia. Walhi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri merupakan forum lingkungan hidup yang beranggotakan Lembaga Swadaya Masyarakat, Kelompok Pencinta Alam serta Organisasi Masyarakat/OR yang dibentuk berdasarkan kesepakatan 20 lembaga yang mempunyai kesamaan visi dalam memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup khususnya diwilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai wahana advokasi lingkungan hidup Walhi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan alat untuk memperjuangkan pemenuhan keadilan, pemerataan, pengawasan rakyat atas kebijakan pengelolaan sumber daya alam, keadilan bersih dan independen serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendorong pengelolaan lingkungan hidup secara lanjutan. Kegiatan yang dilakukan WALHI bersama dengan lembaga-lembaga mitrapemerintah ini secara nyata dapat dilihat dari :

1. Diskusi kepada dinas-dinas terkait melalui kegiatan MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) dalam hal ini adalah BAPEDA dan BLH tentang daya tampung kota Yogyakarta yang sudah melebihi batas dari luasan wilayah perkotaan yang tidak diimbangi oleh peningkatan kualitas lingkungan melalui pengelolaan RTH di kota Yogyakarta, dimana luasan ruang terbuka hijau publik belum mencukupi kuota minimal yang sudah ditentukan.

¹³www.walhi.or.id

2. Menuntut Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dikeluarkannya moratorium pemberian izin pembangunan hotel, melihat dari pembangunan hotel yang terus meningkat dapat mengurangi area yang seharusnya dapat dipergunakan sebagai ruang terbuka hijau.

b) Melakukan Advokasi

Advokasi merupakan senjata utama WALHI Yogyakarta untuk menyelesaikan kasus-kasus kerusakan lingkungan di Yogyakarta. Advokasi yang dilakukan WALHI sudah menjadi sebuah ciri khusus dari gerakan sosial baru yang dilakukan WALHI dengan melibatkan warga dalam setiap bagian dari aksinya tersebut.

1. Jaringan Advokasi WALHI Yogyakarta

Berdasarkan dokumen dari pelatihan advokasi internal WALHI Yogyakarta yang dihadiri oleh penulis WALHI Yogyakarta memiliki tiga garis besar dalam advokasinya yaitu :

Tabel.III.I Data Primer: Sumber Walhi Yogyakarta

Jaringan Advokasi	Keterangan
Kerja pendukung	Dalam kerja pendukung ini berisi pengumpulan data, analisis, dana, logistik, informasi dan juga akses kepada warga juga WALHI Yogyakarta untuk mendukung proses gerakan ini.
Kerja Basis	Dalam kerja ini biasa disebut oleh WALHI Yogyakarta sebagai “dapur”, karena dalam gerakan ini berisi tentang membangun basis masa, lalu pendidikan politik kader, membentuk lingkaran inti, mobilisasi aksi serta kampanye.
Kerja Garis Depan	adalah garda depan dalam advokasi hukum yang diberikan kepada masyarakat, kerja ini memiliki fungsi juru bicara, lobi dan negosiasi, terlibat dalam proses legislasi dan litigasi, menggalang sekutu dan juga kampanye. Contohnya adalah saat WALHI Yogyakarta mendatangi Kantor Bupati Sleman bersama warga untuk audisensi juga dengar pendapat.

Jaringan kerja advokasi yang dimiliki WALHI Yogyakarta bertujuan untuk menentukan bagaimana advokasi itu seharusnya berjalan sesuai dengan kenyataan dilapangan serta kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat yang diberikan bantuan. Meskipun memiliki 3 jaringan kerja advokasi, kerja pendukung berupa pengumpulan data dan informasi adalah sebuah kerja yang dilakukan terus menerus oleh WALHI Yogyakarta sebagai bentuk pemberharuan dalam

kepemilikan data, serta untuk memastikan dalam gerakan sosial mereka ini mendapat sumber data yang mumpuni.

2. Proses Advokasi Walhi Yogyakarta

Proses advokasi yang dilakukan WALHI Yogyakarta secara garis besar memiliki tiga proses yang setiap proses itu memiliki tujuan dan metode yang berbeda, proses itu dipilih berdasarkan keadaan masyarakat, juga tingkat permasalahan yang ada. Proses dan metode ini meskipun berbeda strategi tapi merupakan cara yang satu.

a) Proses Juridiksi dan Legislasi

Karena advokasi ini kebutuhan warga maka dalam setiap proses yang dilakukan WALHI Yogyakarta akan selalu berhubungan dengan masyarakat, mulai dari pemilihan waktu aksi sampai pada waktu untuk melakukan gugatan ke pengadilan, Walhi Yogyakarta memberikan informasi, data, dan juga cara kepada masyarakat.

Dalam tahap ini tujuannya adalah untuk melihat isi atau content dari suatu kebijakan yang pemerintah buat, ataupun pihak swasta, dan proses ini adalah proses yang paling sering dilakukan oleh Walhi Yogyakarta atas permintaan masyarakat dan juga melihat keadaan di lapangan. Proses ini sendiri berisikan pengajuan usul, konsep tanding, dan pembelaan yang akan dipilih, terlepas dari gugatan ini nantinya akan ditujukan kepada Pemerintah ataupun pada pihak swasta, selain itu juga ada proses-proses berupa *legal drafting*, *counter drafting*, *judicial review*, dan litigasi. Hal ini untuk mencari

celah dan juga kesalahan dari produk hukum juga mencari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun Pemerintah itu sendiri entah dari dalam isi kebijakan atau pasal yang tertera, jika dilihat dari isi memang tidak ada kesalahan, maka yang diperhatikan apakah setiap proses yang seharusnya ditempuh oleh pihak swasta atau pemerintah itu telah sesuai, sebagai contoh melihat apakah IMB sudah terbit dalam sebuah pembangunan hotel atau apartemen, juga dokumen AMDAL, apakah sudah ada sebelum IMB diberikan

b) **Proses Politik Birokrasi**

Dalam pelaksanaan proses politik dan birokrasi Walhi Yogyakarta dan warga memberatkan kepada memberikan pengaruh juga memberikan pandangan berdasarkan data juga kenyataan di masyarakat, karena dalam setiap gugatan yang dilakukan Walhi Yogyakarta, masyarakat merasa takut untuk memberikan pengakuan atau informasi bagaimana kejadian yang terjadi sesungguhnya.

Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa tata cara kebijakan dilaksanakan dengan sesuai atau Walhi Yogyakarta menyebutnya adalah advokasi dilihat dari strukturnya. Tindakan yang dilakukan dalam proses ini adalah lobi kepada pemerintah mengenai bagaimana seharusnya kejadian ini ditangani, dan juga memastikan bahwa Pemerintah menyediakan waktu untuk tatap muka dengan warga sekitar yang menolak sebuah pembangunan hotel misalnya. Lalu negosiasi juga mediasi dan kolaborasi. Dalam tahap negosiasi ini

dilakukan bila semua proses aturan dan hukum sudah dilaksanakan sesuai oleh pihak swasta yang melakukan pembangunan, tapi disisi lain juga mengakomodir keinginan warga sekitar mengenai cara mereka untuk hidup berdampingan, entah dari saat pembebasan lahan, biaya ganti rugi ataupun batasan-batasan yang diinginkan oleh warga sekitar

c) Proses Sosialisasi dan Mobilisasi

Tindakan yang dilakukan dalam proses ini adalah membentuk opini public, menyebarkan isu juga memberikan tekanan politik baik kepada pemerintah atau kepada pihak swasta. Tujuan dalam proses ini adalah untuk mempengaruhi dan merubah kultur baik dari sisi masyarakat maupun sisi Pemerintah sendiri. Kegiatan yang dilakukan oleh Walhi Yogyakarta adalah dengan cara kampanye lalu siaran pers dengan menulis di Koran-koran, di website. Selain itu ada juga pendidikan politik dalam konteks penguatan warga untuk lebih memahami kebijakan juga birokrasi di pemerintah, dan terakhir adalah demo dan sebagainya.

Karena tujuannya adalah untuk mempengaruhi dan juga merubah kultur, maka target dari proses ini adalah masyarakat juga pemerintah, mempengaruhi juga merubah kultur masyarakat dengan menggunakan pendidikan, juga pendampingan lalu diskusi bersama.

Sedangkan untuk mempengaruhi dan merubah kultur pemerintah dengan cara memberikan tekanan politik, juga audiensi

bersama masyarakat, kegiatan ini dipastikan diliput media agar lebih memiliki kekuatan untuk menekan. Proses ini adalah proses yang juga sering dilakukan, selain proses litigasi seperti yang dijelaskan, letak perbedaannya dengan proses litigasi adalah proses ini dapat dilakukan saat ada kasus yang tengah terjadi dengan memberikan tekanan pada pemerintah juga pihak swasta, dan juga pendidikan yang dilakukan secara terus menerus melalui pendampingan yang dilakukan Walhi Yogyakarta kepada masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses ini adalah proses yang terjadi terus menerus terlepas ada kasus yang dihadapi maupun tidak.

Dalam advokasinya Walhi Yogyakarta memiliki empat isu strategis yang dijadikan sebagai pedoman bagi Walhi Yogyakarta untuk memberikan advokasi lingkungan terhadap suatu kasus. Isu pertama adalah bencana ekologis, kedaulatan pangan, air, dan tata ruang. keempat isu tersebut adalah sebuah acuan yang memang masih sangat umum, dan setiap isu strategis memiliki isu-isu turunan yang lebih spesifik. Empat isu tersebut adalah salah satu upaya Walhi Yogyakarta dalam memetakan krisis-krisis apa saja yang terjadi dan mungkin terjadi di Yogyakarta. Berdasarkan pada hal diatas maka WALHI Yogyakarta memiliki dua metode advokasi yang biasa dilakukan oleh Walhi Yogyakarta yaitu :

a) *By Case*

Advokasi yang dilakukan WALHI Yogyakarta dalam konteks ini adalah WALHI menerima, meninjau, dan juga menganalisis isu-isu yang ada dan tengah berkembang dalam masyarakat atau wilayah sekitar,

melalui analisis media massa, analisa ini dibutuhkan untuk menindak lanjuti setiap kasus-kasus yang muncul di lapangan, selain analisis media massa, WALHI Yogyakarta juga menerima laporan dari masyarakat mengenai permasalahan lingkungan yang terjadi di wilayah mereka dan untuk laporan dari masyarakat itu sendiri akan ditindak lanjuti apabila sudah memenuhi syarat yaitu melihat dampak yang disebabkan oleh kasus tersebut, serta aktor yang terlibat dalam sebuah kasus yang dilaporkan.

Hal ini dimaksudkan agar kasus atau isu yang dipilih WALHI Yogyakarta untuk di advokasi adalah benar-benar keinginan dari seluruh warga, bukan hanya keinginan segelintir orang yang merasa bahwa hal tersebut dapat merugikan diri mereka sendiri, pelaporan yang diberikan biasanya melalui surat yang ditujukan ke Walhi Yogyakarta.

b) Berdasarkan dengan 4 isu strategis

Advokasi yang dilakukan dengan didasarkan pada isu, dengan tujuan untuk memberikan pencegahan kepada daerah-daerah yang memiliki potensi akan terjadinya krisis, dengan melibatkan warga sekitar. Cara yang digunakan dalam proses pendampingan ini adalah dengan memberikan edukasi kepada warga sekitar akan potensi dan juga kondisi lingkungan agar warga memiliki kesadaran akan kondisi lingkungannya sendiri. Pendampingan dan edukasi ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari FGD lalu melakukan pemetaan terhadap kondisi wilayah dan lingkungan warga sekitar supaya warga menjadi lebih peka akan kondisi

lingkungan dan dapat melindungi jika terjadi indikasi akan terjadinya pengrusakan lingkungan.

Dalam konteks yang didasarkan kepada 4 isu strategis ini, Walhi Yogyakarta lebih mengutamakan kepada pencegahan dan juga kemandirian warga untuk dapat mengelola juga menjaga lingkungan tempat tinggal mereka. Memunculkan kepedulian ini adalah tujuan utama dari advokasi dengan cara ini.

c) Melakukan investigasi

Investigasi adalah suatu proses penyelidikan untuk mencegah atau menindaklanjuti suatu kesalahan atau kejadian. Pelaksanaan survei investigasi dilakukan 35 melalui serangkaian kegiatan mencakup pengumpulan data lapangan, berita di media massa, aspirasi masyarakat sekitar lokasi kejadian, analisis keseluruhan data, membuat kesimpulan, dan membuat *safety recommendation*.

Melalui Divisi Investigasi dan respon issue, Walhi Yogyakarta berusaha untuk tetap menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat. Baru kemudian hasil dari investigasi dan respon issue tersebut akan dimasukkan dan dibahas melalui divisi data dan info untuk kemudian akan di publikasikan melalui divisi kampanye. Hal ini dimaksudkan agar kasus atau isu yang dipilih Walhi Yogyakarta untuk di advokasi adalah benar-benar keinginan dari seluruh warga, bukan hanya keinginan segelintir orang yang merasa bahwa hal tersebut dapat merugikan diri mereka sendiri.

d) Melakukan kampanye secara meluas dan menyeluruh

Data yang didapat dari hasil investigasi kasus seperti yang sudah dibahas diatas menjadi referensi pokok yang dilakukan oleh Walhi Yogyakarta untuk diberitahukan

secara luas dan menyeluruh. Dan dimaksudkan untuk membuat masyarakat menjadi lebih tahu tentang permasalahan, melalui media data seyogyanya akan menambah wacana yang mengundang perhatian dan apresiasi dari masyarakat. Hasil investigasi merupakan hasil pengusutan yang terencana dan sistematis dan diteliti secara mendetail yang kemudian menjadi sebuah pengetahuan baru (*new knowledge*) yang disebarakan melalui berbagai media termasuk melalui kampanye. Seperti :

1. Workshop dan seminar.
2. Aksi dengan menggunakan massa untuk memberi *preassure* kepada para pelaku kebijakan.

Dengan melakukan kampanye dengan sasaran masyarakat secara umum, sekaligus berkonsentrasi pada pengaruh opini publik dan media massa yang diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan yang olehnya dikeluarkan pemerintah.

e) Membangun *critical mass* sebagai wujud dari pentingnya Lingkungan hidup

Membangun *critical mass* sebagai wujud dari perjuangan lingkungan hidup yang sejati yang berfungsi untuk menahan dan melawan laju ketidakadilan lingkungan yang bermuara pada bencana alam dan rusaknya tatanan ekosistem kelestarian bumi. Maka penting dan mendesak untuk dilakukan. Hal yang dapat dilakukan yaitu :

1. Mengetahui saat ini hidup dalam ancaman bencana alam : WALHI beranggapan bahwa masyarakat harus mengetahui bahwa saat ini, kita yang hidup pada zaman modern semakin rentan terhadap ancaman bencana ekologis yang diakibatkan oleh faktir terbesar adalah eksploitasi terhadap alam dan sumber daya yang terkandung di dalamnya.

2. Mau berbuat untuk keselamatan bersama , paling tidak untuk keselamatan keluarganya.
3. Pro pendekatan bioregio dan melakukan penistaan atas pendekatan sektoral : WALHI menganggap bahwa seharusnya kita melihat permasalahan lingkungan dari pendekatan bioregio dan bukannya dari pendekatan sektoral. Pemerintah harus melihat lingkungan sebagai bagian yang integral dalam pembangunan, karena mengesampingkan lingkungan dalam pembangunan hanya akan merugikan bangsa kita sendiri dan menyengsarakan rakyat. Walhi menghimbau untuk menghentikan segala praktek illegal logging di seluruh bumi Indonesia. Dan pemerintah harus mampu secara tegas menindak segala pelaku illegal logging ini serta semua aparat pemerintah lainnya yang terkait di dalamnya.
4. Siap untuk membangun kekuatan politik alternatif.
5. Berbuat nyata untuk bumi.

3. Fungsi Subsider

Fungsi ini adalah peranan tambahan dalam arti bahwa LSM hanya berperan untuk memberi dukungan, menunjang atau menjadi pelaksana program-program pemerintah yang ada dan ditujukan pada kelompok sasaran masyarakat yang telah menjalin hubungan baik dengan LSM yang bersangkutan.

Ruang terbuka hijau merupakan rencana atau tindakan nyata dari pemerintah untuk menanggulangi peningkatan dan kemajuan suatu kota yang pesat. Sebagai salah satu upaya untuk menjaga ekosistem lingkungan dipoerkotaan, ruang terbuka hijau dirasa penting keberadaannya. Walhi Yogyakarta sebagai salah satu pihak paling depan dalam menjaga

kelestarian lingkungan selalu berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan, untuk itu dalam menjalankan fungsi subsider atau tambahan Walhi Yogyakarta menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi terkait kebijakan RTH di Kota Yogyakarta

Dalam menjalankan Fungsi Subside Walhi Yogyakarta mencoba membantu pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi-sosialisasi terkait kebijakan Ruang terbuka hijau di kota Yogyakarta, seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya Walhi Yogyakarta dalam menjalankan fungsinya sebagai LSM lingkungan melakukan kegiatan kampanye secara menyeluruh, melalui berbagai media termasuk melalui kampanye. Seperti :

- a) Workshop dan seminar.
- b) Aksi dengan menggunakan massa untuk memberi *preassure* kepada para pelaku kebijakan.

2. Melakukan Kampanye Lingkungan

Kampanye yang dilakukan oleh Waalhi Yogyakarta dengan sasaran masyarakat secara umum, sekaligus berkonsentrasi pada pengaruh opini publik dan media massa yang diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Selain itu, Walhi juga memberi pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan terutama RTH. Pemahaman tersebut diberikan kepada masyarakat untuk mengolah lahan kosongnya agar lebih asri dengan RTH yang tertata rapi.

Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara dengan Dewan daerah Walhi DIY Halik Sandera :

Bagaimana dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah? Apakah walhi juga selalu memberikan respons, terutama kebijakan yang menyangkut tata ruang khususnya Ruang terbuka Hijau?

“pada dasarnya Walhi terdiri dari beberapa LSM, Walhi sendiri lebih banyak bermain di tingkat kebijakan dan advokasi publik. Sesuai dengan kawasan-kawasan yang menjadi lokasi utama kegiatan advokasi Walhi Yogyakarta. baru rangkaian kegiatannya dilakukan oleh anggota basis ataupun dari organ-organ support yang ada di Walhi Yogyakarta.”¹⁴

Selain dengan melakukan kegiatan Kampanye dan sosialisasi, Walhi bersama dengan Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Kementerian PU, Dinas Tata Ruang Jakarta, BAPPEDA dan BLH, aktivis Kampung Hijau Gambiran melakukan penanaman pohon di tepian Sungai Gajah Wong RW 8 Gambiran Baru, Pandeyan, Umbulharjo mulai dari Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta sampai Bantul. Penanaman pohon tersebut juga merupakan penanda pembangunan taman ruang terbuka hijau seluas 5000 meter² di Gambiran yang menggunakan bantuan pusat sebesar Rp 800 juta¹⁵.

Menindaklanjuti dari kegiatan yang dilakuakn oleh Walhi dan Pemerintah, selanjutnya Walhi bersama-sama Masyarakat mengadakan kegiatan sosialisasi

¹⁴*Ibid*

¹⁵ <http://liputan.ternsapa.com/kampung-hijau-gambiran-andai-ada-lebih-banyak/>

lingkungan melalui berbagai media. Salah satunya adalah melalui seni, yakni melalui acara peringatan hari bumi yang mengundang tokoh penting seperti Amien Rais.

B. Kendala Walhi Yogyakarta dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat

Semua tujuan yang ingin dicapai oleh Walhi Yogyakarta disadari bukanlah sebuah hal serta merta dapat diwujudkan dengan cepat juga mudah, karena dalam perjalanannya ditemukan juga hambatan-hambatan dalam setiap gerakan yang dilakukan. Hambatan yang dirasakan ini bukan dijadikan sebuah alasan untuk Walhi Yogyakarta untuk tetap mendampingi masyarakat juga melindungi hak-hak warga juga hak-hak lingkungan.

Hambatan yang dirasakan Walhi Yogyakarta secara garis besar berasal dari luar instansi, namun di dalam lingkungan Walhi Yogyakarta sendiri ada beberapa hambatan meskipun oleh Direktur bukan dianggap sebuah halangan untuk terus bekerja. Hambatan dari sisi internal lembaga adalah dengan kurangnya staf, juga komunikasi yang masih kurang baik dalam lingkup anggota. Hal ini karena dalam realitanya staf yang berada dibawah komando Direktur tidak selalu bisa selalu bekerja sesuai masa jabatan Direktur selama empat tahun. Pergantian staf sendiri memang menjadi kendala yang masih sering ditemukan, entah karena faktor staf tersebut menikah, atau mendapat pekerjaan yang tetap ditempat lain.

Kerja Walhi Yogyakarta sendiri karena memang sebuah LSM maka secara finansial tidaklah cukup dijadikan sebuah profesi utama, dan dikarenakan hal tersebut maka staf yang ditunjuk oleh Direktur sendiri adalah mahasiswa tingkat akhir, ataupun yang sudah lulus tapi masih aktif di kegiatan lingkungan, maka dengan kata lain hambatan internal adalah seputar masalah kaderisasi staf. Selain hambatan tersebut, hambatan yang berasal

dari luar lembaga yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Daerah itu sendiri, baik dari bentuk keterbukaan kepada WALHI Yogyakarta maupun pada bentuk kebijakan yang memang terlihat tidak konsisten dan juga penuh celah membuat gerakan advokasi WALHI Yogyakarta terbentur dengan kebijakan yang aneh dan juga tidak konsisten, seperti kebijakan RTRW Kota Yogyakarta sebagai salah satu contohnya.

Hambatan lain yang ditemui WALHI Yogyakarta juga hadir dari diri masyarakat yang dibantu, baik secara kultur maupun secara sikap dari warga sendiri yang masih tertutup. Sedangkan untuk masalah kultur contohnya adalah penduduk lereng Merapi yang masih melakukan penambangan pasir saat dulu tengah didampingi oleh WALHI Yogyakarta, lalu permasalahan ancaman yang memang selalu ada saat-saat melakukan kegiatan advokasi, terutama pada proses pengumpulan data juga analisa wilayah yang biasanya dilakukan oleh preman-preman dari pihak yang merasa dirugikan dengan adanya WALHI Yogyakarta yang membantu masyarakat. Lalu hambatan di persidangan yang dialami adalah saat pihak yang digugat melakukan banding, dan karena proses sidang memerlukan biaya terus menerus, sedangkan pihak yang digugat adalah korporasi yang memiliki dana besar, maka hal seperti ini juga hambatan yang kadang dirasakan dalam gerakan yang dilakukan oleh WALHI Yogyakarta dalam menjalankan setiap aksi-aksinya.

Tabel.III.2 Hambatan dan Kendala WALHI Yogyakarta

Hambatan internal	Hambatan Eksternal
Kurangnya staf dalam eksekutif kepengurusan WALHI Yogyakarta	Keterbukaan informasi dari pemerintah kabupaten maupun propinsi
Komunikasi yang kurang luwes antar staf	Kebijakan yang tidak konsisten aneh dari pemerintah menyebabkan banyak celah yang dapat menyebabkan masalah baru, dan juga menyebabkan upaya WALHI Yogyakarta dalam gerakan advokasinya terbentur
Kaderisasi yang minim	Kultur masyarakat yang masih sulit terbuka terhadap kedatangan WALHI, namun perlahan dapat ditangani
Ancaman dari pihak yang merasa dirugikan oleh gerakan WALHI Yogyakarta terutama ketika membantu masyarakat	